

BAB I

PENAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hukum merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, hukum adalah suatu norma atau aturan yang mengikat dimana setiap perbuatan selalu ada batasannya, hukum juga dapat di artikan sebagai sistem norma/kaidah.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak dapat lepas dari norma dan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Setiap perbuatan manusia atau tingkah laku manusia itu ada aturannya, baik dipandang dari segi hukum adat, hukum islam maupun hukum pidana. Sebagai warga negara Indonesia kita harus sadar, taat dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di dalamnya. Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioritis umum tertentu di dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan , yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar baik dan buruk.² Jika melihat negara Indonesia adalah negara hukum, maka perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang pasti akan di kenai sanksi atau denda sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Secara yuridis dapat di pahami dari Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang bunyinya :

¹ Juhaya. S. Praja. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 167.

² Sudikno Mertokusumo. 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm.120.

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan-peraturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana apabila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan jalan mencegah dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum baik kepentingan orang-perorangan atau individu, kepentingan masyarakat atau kolektivitas serta kepentingan negara atau pemerintah, dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan. Sehingga pemberian sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya.⁴

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah perjudian, karena perjudian bisa dilakukan dimana saja

³ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.98.

⁴ S.R. Sianturi, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Patehaem, hlm.57.

dan dalam bentuk apa saja. Perjudian atau berjudi berasal dari kata “judi” yang artinya adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan.

Selama ini masyarakat paham, judi merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan undang-undang, dimana merupakan perbuatan yang di larang, akan tetapi walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sebagian masyarakat khususnya di daerah Boyolali melakukan tindak pidana tersebut dan bahkan dilakukan disepul pagelaran hiburan rakyat, salah satu bentuk perjudian yang dilakukanya adalah judi dengan menggunakan dadu dengan cara menebak nomor dadu yang akan muncul setelah dadu ditaruh dalam bathok kelapa, dalam bahasa jawa jenis judi tersebut adalah “Othok”.

Pada dasarnya penegakan hukum mengenai perjudian sebetulnya sama dengan penegakan hukum pada umumnya, dimana perjudian sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tetapi tidak dijelaskan secara rinci definisi dari perjudian. Akan tetapi dalam

UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) di atur sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidanadenda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin melakukan:

- 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*
- 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;*
- 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”*

Kemudian di pasal yang sama 303 ayat (3) menjelaskan judi adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkina mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir.⁵

Selain pasal yang mengatur perbuatan tersebut, disini peran penegak hukum atau polisi sangat di perlukan, penegak hukum sebagai bagian dari anggota masyarakat, juga terkait dengan norma hukum. Semua tindakan dalam penegakan hukum harus berpedoman terhadap norma hukum.⁶ Pencegahan melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah dilakukan, melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi hidup atau nyata. Akan tetapi semua itu tidak akan maksimal jika masyarakat tidak berperan aktif dalam melaporkan tindak pidana tersebut, hal yang demikian dapat disebabkan karena sebagian masyarakat setempat juga ikut melakukan perbuatan itu sendiri (judi). Berdasarkan uraian latar

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3)

⁶ Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.17

belakang masalah tersebut, penulis tertarik memfokuskan pembatasan masalah lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi dengan judul :

Perjudian di Seputar Pagelaran Hiburan Rakyat Dalam Prespektif Kriminologi dan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis utarakan di dalam latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek kriminologis yang mendorong praktek perjudian di seputar pagelaran hiburan rakyat ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian yang dilakukan di pagelaran hiburan rakyat ?
3. Kendala-kendala pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek kriminologis yang mendorong praktek perjudian di seputar pagelaran hiburan rakyat.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap perjudian yang dilakukan di pagelaran hiburan rakyat.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian dalam proses penegakan hukum perjudian di wilayah hukum Polres Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis berharap dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat dan kegunaan, adapun manfaat dan kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum yang ada di dalam Indonesia, terutama mengenai tindak pidana perjudian.
- b. Memberikan literatur atau referensi terhadap orang yang membacanya.

2. Manfaat praktis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum untuk tegas dalam menerapkan norma norma yang berlaku khususnya tentang tindak pidana baik dilakukan oleh masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah.

E. Kerangka pemikiran

Secara umum, perjudian adalah sebuah permainan di mana sang pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang kemudian sang pemenang akan mendapatkan uang dari pemain yang kalah. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai.⁷

Banyak jenis dan macam-macam perjudian, seperti judi dengan menggunakan kartu, dadu, judi tebak skor, sambung ayam, judi online dan

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> di akses tanggal 26 Maret 2017 pukul 13.07 WIB

masih banyak lagi jenis-jenis judi yang sering kita jumpai terutama judi dengan menggunakan dadu di seputar pegelaran hiburan rakyat. Dalam KUHP sudah mengatur tentang hal tersebut yakni pada pasal 303.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, diciptakanya hukum atau peraturan adalah untuk kedaiamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern antar pribadi.⁸ Serta agar masyarakat tidak semena-mena melakukan perbuatan yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain.

Perbuatan itu juga bisa dilihat dari perspektif kriminologi,⁹ serta objeknya, yakni objek studi kriminologi mencakup tiga hal, yaitu penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁰ Maka dari itu, peran kriminologi di sini juga sangat diperlukan, dimana hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama di bidang etiologi kriminal dan penologi.¹¹ Sehingga dalam menangani kejahatan atau tindak pidana bisa menjadi lebih mudah atau dapat dorongan dari aspek kriminologi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan menemukan gejala atau beberapa penyebab, yang bertujuan guna memperoleh data-data yang benar dan riil,

⁸ Sudikno Mertokusumo, *op. cit.* hlm.81.

⁹ Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan, keseragaman, pola, dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Wolfgang Savitz dan Johnston dalam, *The Sociology of crime and Delinquency*. Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia.hlm.201.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 201.

¹¹ Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.20

suatu penelitian ini harus menggunakan metode yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris.¹² Pendekatan Penelitian yang memulai pendekatan di aspek perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan terhadap praktek penegakan hukum di masyarakat, yuridis empiris dilakukan terhadap pelanggaran tindak pidana perjudian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif.¹³ Adapun yang akan penulis analisa dalam penelitian ini adalah mengenai aspek kriminologis dari tindak pidana perjudian kemudian penegakan hukum serta kendala-kendala aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di daerah Boyolali, khususnya di tempat pagelaran hiburan rakyat saat berlangsung, kemudian selain itu penulis juga mengambil lokasi Polsek Boyolali. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan mendapatkan data yang penulis akan teliti kemudian menghemat biaya dan waktu.

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.hlm.51 pendekatan empiris yakni suatu metode penelitian yang di lakukan untuk memperoleh data primer dilapangan

¹³ Jenis penelitian diskriptif yang di maksud adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya, lihat Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.hlm.10

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer.¹⁴ Berupa sejumlah keterangan atau fakta yang di peroleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni pelaku, aparat kepolisian, dan tokoh masyarakat di daerah Boyolali (Polres Boyolali).

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni berupa norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974
Tentang Penertiban Perjudian.

2) Bahan hukum sekunder

Berupa bahan-bahan atau buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung atau memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, Ensiklopedia, dan lain sebagainya.

¹⁴ Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, Saifudin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.91.

c. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang di perlukan dari penelitian akan dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data antara lain:

1) Studi Kepustakaan

Memperoleh data yang digunakan di dalam penelitian ini dengan mengumpulkan beberapa data yaitu berupa literatur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan hukum yang terkait dengan penelitian ini.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan degancara wawancara.¹⁵ wawancara suatu metode yang di lakukan penulis untuk memperoleh data secara langsung terhadap objek yang akan diteliti bertujuan untuk memperoleh data primer dengan cara wanwancara. Penulis melakukannya dengan pelaku, tokoh masyarakat, dan Polres Boyolali mengenai judul yang penulis teliti yakni perjudian di seputar pagelaran hiburan rakyat.

d. Metode Analisis Data

Penulis melakukan penelitian dengan menganalisis data yang meliputi perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, doktrin, dan lain sebagainya yang terkait dengan perjudian, sehingga bisa dihubungkan dengan data yang diperoleh penulis dilokasi penelian baik dari studi kepustakaan ataupun wawancara, yang pada akhirnya dapat disusun

¹⁵ Wanwancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan diantara dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, 2007, Jakarta: PT.Bumi Aksara, hlm.8.

secara sistematis untuk ditarik kesimpulanya. Metode pengambilan kesimpulan yang penulis teliti adalah dengan menggunakan metode induktif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini, maka penulis menarik garis besar yang di gambarkan sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pustaka, yang berisikan mengenai uraian dasar teori yang meliputi, tinjauan umum tentang tindak pidana perjudian, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang sebab-sebab orang melakukan tindak pidana (kriminologi).

BAB III Isi dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai Aspek kriminologis yang mendorong praktek perjudian di seputar pagelaran hiburan rakyat, implementasi penegakan hukum terhadap perjudian yang dilakukan di pagelaran hiburan rakyat serta kendala-kendala pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian tersebut.

BAB IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan apa yang telah penulis teliti.